

The Spirit of the Anti-Corruption Movement in the Campus Environment Through Various Community Creativity Social Media Movements

Rudolf Johanes Hasoloan

Universitas Negeri Semarang, Indonesia
rudolfjohanes@students.unnes.ac.id

Maria Genoveva Dian Larasati

Universitas Negeri Semarang, Indonesia
maria_g_dian_l@students.unnes.ac.id

Fiki Elfanda Yusuf

Universitas Negeri Semarang, Indonesia
fikielfandayusuf@students.unnes.ac.id

Destha Birul Imantria

Universitas Negeri Semarang, Indonesia
desthabirul007@students.unnes.ac.id

Novita Sulistyawati

Universitas Negeri Semarang, Indonesia
sulistyawatinovita73@students.unnes.ac.id

Journal of Creativity Student

2022, Vol. 7(2) 283-310

© The Author(s) 2022

DOI: **10.15294/jcs.v7i2.38207**

This journal has been accredited by

Ministry of Education, Culture,

Research & Technology of Republic

Indonesia (Rank SINTA 5).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of **Creative Common Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**

History of Manuscript

Submitted : February 22, 2022

Revised 1 : April 23, 2022

Revised 2 : August 15, 2022

Accepted : November 21, 2022

Online since : December 20, 2022

Abstract

The causes of corruption include weak religious teachings, ethics, knowledge, education, and the imposition of

sanctions and a weak government structure. Eradication of corruption can be done through education, because education has a very strategic position in an effort to build an anti-corruption attitude, especially to the younger generation. In this case, students have a role to not be permissive of corruption and together rise up against corruption. The research method in this paper uses qualitative research methods from individual and institutional journalistic sources, and the research uses empirical methods with a discussion technology-based approach, namely the Zoom Meeting application/web to find data from lighters and respondents. The purpose of this paper is to understand the causes of corruption and to find out why students should build the spirit of the anti-corruption movement in the campus environment. With the conclusion that someone commits acts of corruption because of factors both from within and from outside. so that students have a role in encouraging and inviting the public to act to create justice so that corruption does not occur.

KEYWORDS

Corruption ▪ Technology ▪ Students

A. Pendahuluan

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptus* atau *corruption* yang memiliki arti keburukan, ketidak jujuran dan tidak bermoral. Dalam bahasa Inggris dan Perancis dikenal pula istilah *corruption* yang artinya penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Korupsi, merupakan sebuah kata yang sudah sangat tidak asing terdengar di telinga kita semua. Tidak hanya di negara Indonesia, nyatanya tindakan korupsi juga merupakan sebuah masalah yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia. Dari

pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa sebenarnya istilah korupsi tidak hanya digunakan untuk mengungkapkan tindakan penyalahgunaan uang saja. Penyalahgunaan wewenang juga bisa menyangkut waktu, dan lain sebagainya. Namun yang berkembang di seluruh negara istilah korupsi identik digunakan untuk mendeskripsikan penyalahgunaan keuangan untuk kepentingan pribadi.

Di negara Indonesia sendiri pengertian korupsi dalam KBBI diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi. Ada beberapa pendapat para sarjana yang menguraikan tentang pengertian korupsi, salah satunya adalah Sam Santoso yang secara tegas mengatakan bahwa korupsi adalah bentuk lain dari pencurian, dimana korupsi merupakan wujud penyimpangan jabatan untuk mendapatkan keuntungan baik berupa status ataupun kekayaan untuk pribadi/kelompok tertentu. Lain halnya dengan Robert Klitgaard yang mengatakan bahwa korupsi merupakan sebuah tindakan menyimpang dari jabatan untuk mendapatkan keuntungan baik berupa status ataupun uang. Robert mengatakan bahwa korupsi identik dengan pejabat negara.

Di negara Indonesia korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana yang hukumannya ditentukan didalam peraturan khusus yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meski sudah uraikan secara jelas bahwa korupsi merupakan tindakan menyimpang yang hukumannya telah ditentukan, nyatanya sampai detik ini praktek tindak korupsi masih menjamur di sistem pemerintahan negara Indonesia sebab tindakan korupsi sudah melekat dalam sendi kehidupan bangsa Indonesia.¹ Korupsi merupakan suatu kejahatan yang terus berkembang secara dinamis seiring berjalannya waktu karena sejatinya tindak pidana korupsi timbul akibat dari adanya pola hidup manusia yang materialis. Dari keseluruhan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan sebuah tindakan tercela atau tindakan buruk yaitu berupa penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan

¹ Lasmauli Noverita Simarmata, 2021. *Korupsi Sekarang dan yang Akan Datang*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 11 (2), hlm. 88.

untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu baik itu dalam bentuk jabatan ataupun sebuah kekayaan. Singkatnya, korupsi merupakan sebuah tindakan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri dengan merugikan keuangan negara.

Korupsi dewasa ini telah menjadi komoditas perbincangan publik dan telah menjadi epidemi sosial yang menjangkiti mekanisme kerja para birokrat dan kehidupan politik dan sosial masyarakat Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan melalui peraturan perundang undangan, namun karena korupsi bersifat multidimensi maka solusi pemberantasannya tidak cukup hanya melalui aturan hukum atau undang-undang. Pemerintah telah membuat kebijakan bertahap dan terstruktur untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban manusia, dengan menggelar pendidikan karakter yang mencakup pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi dilaksanakan di sekolah baik sebagai kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler maupun di lingkungan masyarakat dan keluarga. Fakta yang tidak dapat disangkal adalah kita belum dapat mencapai tujuan yang diharapkan meskipun pendidikan anti korupsi telah dilakukan dengan cara dan metode yang berbeda di setiap jenjang pendidikan.

Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen DIKTI) terkait penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi, mulai tahun 2012/2013 perguruan tinggi harus menyelenggarakan pendidikan antikorupsi. Kebijakan tersebut mengatur bahwa pendidikan antikorupsi dilakukan dalam mata pelajaran pembelajaran yang terintegrasi dalam kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler dan budaya kampus/sekolah. Bidang lain sebagai wadah pengembangan pendidikan antikorupsi yang didukung hingga tingkat universitas berupa penguatan nilai koordinasi sebagai salah satu pilar pendukung antikorupsi adalah program asrama, isi kurikulum, dan kegiatan ekstrakurikuler.

Pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui pendidikan, karena pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis dalam upaya membangun sikap anti korupsi khususnya kepada generasi muda. Sektor pendidikan formal dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi sebagai

strategi pencegahan. Dalam hal ini mahasiswa dijadikan sebagai sasaran sekaligus diberdayakan sebagai pers lingkungan agar tidak permisif terhadap korupsi dan bersama-sama bangkit melawan korupsi. Mahasiswa adalah mereka yang dalam waktu relatif singkat akan segera bersentuhan dengan beberapa aspek pelayanan publik, yaitu “mahasiswa hari ini, pemimpin masa depan”. Mereka adalah generasi yang akan menggantikan generasi saat ini yang menduduki berbagai posisi dan beberapa di antaranya akan menjadi pengambil kebijakan. Persepsi bahwa korupsi merupakan perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan berbagai norma dan aturan hukum, diharapkan akan diikuti oleh berbagai tindakan dan kebijakan ketika mereka menjadi pembuat kebijakan di kemudian hari. Hal ini dapat terwujud jika mereka telah dibekali pemahaman tentang ruang lingkup, modus, dan dampak korupsi baik dalam lingkup terdekat maupun terkecil hingga lingkup makro dan mencakup skala besar. Sehingga peran mahasiswa sebagai pelopor dalam gerakan anti korupsi sangat dibutuhkan.

Karena luar biasa maraknya tindak pidana korupsi maka upaya hukum saja masih sangatlah kurang untuk menanganinya. Harus ada upaya lain yang ditempuh pemerintah agar persentase tindak pidana korupsi di negara kita tercinta ini dapat menurun. Salah satu upaya yang dapat kita tempuh untuk menekan angka tindak pidana korupsi di Indonesia adalah dengan langkah preventif atau pencegahan. Hal ini berdasarkan atas pertimbangan, bahwa beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya korupsi diantaranya adalah lemahnya ajaran agama dan etika, lemahnya pengetahuan dan pendidikan, kemiskinan, serta penjatuhan sanksi yang lemah hingga struktur pemerintahan yang lunak. Dengan demikian jika kita bisa meminimalisir faktor-faktor yang menyebabkan korupsi maka presentase tindak pidana korupsi juga dapat berkurang seiring berjalannya waktu. Yang perlu diperkuat dalam proses ini adalah peningkatan pemahaman masyarakat tentang korupsi serta menanamkan nilai nilai anti korupsi sejak dini mungkin, agar kedepannya nilai nilai ini senantiasa melekat pada diri setiap orang hingga dewasa.

Itulah mengapa pendidikan anti korupsi harus diajarkan dalam kurikulum sekolah, mulai dari sekolah dasar bahkan sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Mungkin muncul sebuah tanda tanya, mengapa harus sejak dini? Mengapa tidak kita ajarkan nanti saja saat mereka sudah dewasa yang pastinya akan lebih memudahkan dalam proses pemahaman. Jawabannya adalah karena alasan pembentukan karakter. Pembentukan karakter dan penanaman jiwa anti korupsi pada anak memiliki peluang keberhasilan yang tinggi. Meski begitu, pemberian pemahaman terkait korupsi juga tidak bisa disama ratakan untuk semua tingkat usia. Tidak mungkin seorang anak SD dikenalkan pada konsep korupsi yang merupakan sebuah tindak pidana. Nalar mereka belum bisa mencerna maksudnya. Maka alih alih memberikan pengertian korupsi sebagai tindak pidana, lebih baik jika kita mengajarkan kepada anak-anak dengan bahasa yang sederhana, bisa juga dengan memberikan contoh tindakan korupsi dalam kehidupan sehari-hari, dengan demikian materi akan lebih mudah dipahami oleh anak-anak.

Identifikasi Masalah

Bersumber pada pemaparan dan penjelasan sebelumnya, yakni mengenai latar belakang masalah, maka dalam artikel ini, akan membahas tak lain tak bukan yakni mengenai “Bangkitkan Semangat Gerakan Anti Korupsi Dalam Lingkungan Kampus”

Rumusan Masalah

Memandang sebagian kasus yang telah teridentifikasi pada bagian identifikasi masalah tersebut, maka dari itu penulis menentukan formulasi permasalahan mengenai “Bangkitkan Semangat Gerakan Anti Korupsi Dalam Lingkungan Kampus”, yakni sebagai berikut :

- 1) Faktor-faktor apa yang dapat membuat seseorang melakukan tindakan korupsi?
- 2) Mengapakah kita sebagai mahasiswa harus fokus untuk membangun semangat gerakan antikorupsi dalam lingkungan kampus?

B. Metode

Metode merupakan suatu cara kerja. Penelitian merupakan suatu kegiatan terencana, dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan mendapatkan data baru yang digunakan sebagai bukti kebenaran ataupun ketidak benaran dari suatu kejadian. Dalam jenis survei deskriptif, survei yang dilakukan oleh penulis Terlibat dalam penelitian studi kasus, d. H. Penelitian untuk dipelajari Fokus pada situasi saat ini dan latar belakang interaksi Lingkungan unit sosial: individu, kelompok atau masyarakat.

Berdasarkan Project yang kelompok kami teliti dan lakukan, Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Serta menggunakan metode pendekatan yuridisnormatif, yaitu pendekatan yang berpegang dengan aspek yuridis/hukum atau aturan-aturannya dalam mencari dan mengumpulkan data.² Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³ Sedangkan pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan apa adanya yang dilakukan dengan melakukan observasi.

Penelitian kualitatif bukan tentang menguji teori yang ada, tetapi tentang mengembangkan teori baru⁴. Untuk memberikan gambaran tentang penyajian laporan, termasuk kutipan data dalam laporan penelitian. Data yang diambil dapat berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dan dokumen pribadi. Catatan, catatan dan dokumen resmi lainnya⁵.

² Arif Hidayat and Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio Equilibrium Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 133, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>

³ Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 55.

⁴ Achmad Fatchan dan Wayan Dasna, *Metodologi Penelitian Tindakan Kelas* (Surabaya: Jengala Pustaka Utama, 2009), 13.

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013) 11.

Penelitian yang kelompok kami lakukan dengan mencari data atau secara kualitatif dari sumber-sumber jurnalistik individu maupun lembaga, selanjutnya kelompok kami melakukan penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan berbasis teknologi diskusi yaitu aplikasi/web *Zoom Meeting* secara sistematis menggunakan Webinar sebagai alat untuk mencari data dari pemantik dan responden selama kurang lebih 2 jam. Sehingga project kami dapat berjalan sampai dengan penelitian ini.

Dalam Project tersebut kami melakukan webinar dengan pemantik yang bergerak dari penyuluh anti korupsi, dan dalam responden atau partisipasi mencapai 30 lebih, sehingga penelitian ini dapat kami lakukan secara empiris dengan melakukan pengamatan, serta wawancara kepada pemantik dengan diskusi secara langsung di dalam aplikasi tersebut, serta kami juga mengambil data dari para responden terhadap materi yang diberikan yang menjurus pada kejadian korupsi yang ada dalam lingkungan kampus secara khusus ataupun lembaga lain.

Sumber dalam pada penelitian ini memakai data primer & data sekunder. Data utama dari menurut pemateri pada sebuah lembaga sedangkan data sekunder diperoleh melalui literatur yg terdapat pada internet. Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif, mengukur kesesuaian antara peraturan yuridis yg berlaku menggunakan pelaksanaan. Validitas data memakai triangulasi data menggunakan menggali kebenaran berita misalnya dokumen yg terdapat. Analisis data metode interaktif yg berisi empat komponen proses analisis, yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, & penarikan simpulan⁶.

C. Landasan Teori

1. *Principal-Agent Theory*

Keinginan untuk keuntungan pribadi sering dipahami sebagai penyebab utama korupsi sektor publik, tetapi ini merupakan penyederhanaan yang

⁶ Huda, M. W. S., & Hidayat, A. (2021). Quo Vadis Pendidikan di Masa Pandemi: Menyoal Tanggung Jawab Negara terhadap Hak atas Pendidikan Peserta Didik. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(1)

berlebihan dari hubungan kompleks antara individu dan Negara. Ada beberapa teori yang membantu untuk mendekonstruksi hubungan ini. Dua teori yang paling populer tentang korupsi dalam literatur ekonomi adalah model principal-agent dan masalah keagenan terkait.⁷ Model principal-agent mengasumsikan bahwa agen (pejabat publik) berfungsi untuk melindungi kepentingan prinsipal (apakah publik, parlemen, atau pengawas).

Namun, pada kenyataannya, kepentingan agen seringkali menyimpang dari kepentingan prinsipal, dan sementara yang pertama dapat menetapkan aturan pembayaran dalam hubungan prinsipal-agen, ada asimetri informasi untuk keuntungan agen, yang dapat digunakan olehnya untuk keuntungan pribadi.⁸ Dalam konteks ini, masalah keagenan terjadi di mana agen memilih untuk terlibat dalam transaksi yang korup, memajukan kepentingan mereka sendiri dan merugikan kepentingan prinsipal. Untuk membatasi masalah keagenan, prinsipal dapat merancang insentif dan skema (misalnya pemantauan, pengikatan, dan pengawasan) untuk mengekang potensi penyalahgunaan agen untuk memajukan kepentingan mereka sendiri dan merugikan kepentingan prinsipal. Untuk membatasi masalah keagenan, prinsipal dapat merancang insentif dan skema (misalnya pemantauan, pengikatan, dan pengawasan) untuk mengekang potensi penyalahgunaan agen untuk memajukan kepentingan mereka sendiri dan merugikan kepentingan prinsipal. Untuk membatasi masalah keagenan, prinsipal dapat merancang insentif dan skema (misalnya pemantauan, pengikatan, dan pengawasan) untuk mengekang potensi penyalahgunaan agen.

⁷ Klitgaard, R. (1988). *Controlling Corruption*. University of California Press. https://www.google.co.id/books/edition/_/ak8xdW1sY4sC?hl=id&gbpv=1; Shleifer, Andrei, and Robert W Vishny. 1993. "Corruption." *Quarterly Journal of Economics* 108 (3): 599-617

⁸ Groenendijk, N.S. (1997). A principal-agent model of corruption. *Crime, Law and Social Change*, 27, 207-229.

2. *Collective Action Theory*

Selama beberapa dekade, literatur ekonomi mengacu pada model principal-agent untuk menjelaskan korupsi.⁹ Baru-baru ini, teori tindakan kolektif muncul sebagai penjelasan alternatif mengapa korupsi sistemik tetap ada meskipun undang-undang membuatnya ilegal, dan mengapa korupsi menolak berbagai upaya anti korupsi lainnya di beberapa negara. Teori tindakan kolektif melampaui hubungan prinsipal-agen tradisional dan menekankan pentingnya faktor-faktor seperti kepercayaan dan bagaimana individu memandang perilaku orang lain.

Persson, Rothstein dan Teorell (2013) menganggap korupsi sistemik sebagai masalah kolektif, karena orang merasionalisasi perilaku mereka sendiri berdasarkan persepsi tentang apa yang akan dilakukan orang lain dalam situasi yang sama.¹⁰ Ketika korupsi menjadi norma sosial, semua orang mulai melihatnya hanya sebagai cara untuk menyelesaikan sesuatu. Orang-orang menyadari konsekuensi negatif dari korupsi yang meluas, tetapi mereka terlibat dalam tindakan korupsi karena mereka percaya bahwa tidak masuk akal untuk menjadi satu-satunya orang yang jujur dalam sistem yang korup.¹¹ Dalam lingkungan seperti itu, langkah-langkah anti korupsi berdasarkan model principal-agent tidak akan efektif, karena tidak ada “principle principals” yang akan menegakkan norma anti korupsi.¹² Budaya kelembagaan atau organisasi korupsi mengarah pada normalisasi praktik korupsi di tingkat masyarakat maupun individu, dan impunitas karena melanggar atau mengabaikan aturan formal anti korupsi.¹³ Untuk memerangi korupsi dalam

⁹ Groenendijk, N.S. (1997). A principal-agent model of corruption. *Crime, Law and Social Change*, 27, 207-229.

¹⁰ Persson, A., Rothstein, B., & Teorell, J. (2013). Why Anticorruption Reforms Fail—Systemic Corruption as a Collective Action Problem. *Governance*, 26, 449-471.

¹¹ Marquette, H., & Peiffer, C. (2015). Corruption and collective action

¹² Klitgaard, R., & Treverton, G. F. (2004). Assessing partnerships: New forms of collaboration. *Collaboration: Using networks and partnerships*, 21-60; Persson, A., Rothstein, B., & Teorell, J. (2013). Why Anticorruption Reforms Fail—Systemic Corruption as a Collective Action Problem. *Governance*, 26, 449-471.

¹³ Appolloni, A., & Nshombo, J.M. (2014). Public Procurement and Corruption in Africa: A Literature Review.

situasi seperti ini, diperlukan pendekatan kolektif dan terkoordinasi, seperti koalisi reformasi atau aliansi proaktif dari organisasi yang berpikiran sama. Pendekatan-pendekatan ini sering disebut inisiatif "tindakan kolektif".

3. *Institutional Theory*

Teori kelembagaan ini dikenal juga sebagai institusionalisme, dimana menggunakan karakteristik institusional negara dan pemerintah, seperti aturan hukum yang sudah ada sebelumnya, norma antikorupsi yang terdefinisi dengan baik, dan institusi anti korupsi independen dengan kekuatan penegakan guna menjelaskan korupsi di sektor publik. Teori institusional memeriksa proses dan mekanisme yang struktur, skema, aturan, dan rutinitas menjadi ditetapkan sebagai pedoman otoritatif untuk perilaku sosial.¹⁴

Dalam kaitannya dengan pemahaman korupsi, teori institusional membawa konteks sosial dan memberikan taksonomi untuk memahami bagaimana korupsi bisa mengakar dalam organisasi, institusi dan masyarakat, meskipun ada kerangka anti-korupsi.¹⁵ Teori institusional memandang bahwa korupsi dipengaruhi karakter, desain dan transparansi sistem politik dan institusinya. Pada saat yang sama, ia mengakui bahwa hubungan antara korupsi, institusi, sistem politik, budaya dan gender sangat kompleks.¹⁶ Sejumlah besar penelitian telah difokuskan pada hubungan antara lembaga-lembaga politik di satu sisi dan di sisi lain mengenai prevalensi dan tingkat korupsi.

4. *Game Theory*

Teori lain yang menjelaskan prevalensi korupsi sektor publik adalah teori permainan. Teori ini meminjam dari literatur ekonomi dan berusaha memberikan alasan untuk keputusan melakukan tindakan korupsi oleh pejabat publik. Secara khusus, Macrae dalam karyanya menunjukkan bahwa korupsi

¹⁴ Scott, W. R. (2005). Institutional theory: Contributing to a theoretical research program. *Great minds in management: The process of theory development*, 37(2), 460-484.

¹⁵ Luo, Y. (2005). An organizational perspective of corruption1. *Management and Organization Review*, 1(1), 119-154.

¹⁶ Debski, J., Jetter, M., Möslle, S., & Stadelmann, D. (2018). Gender and corruption: The neglected role of culture. *European Journal of Political Economy*, 55, 526-537.

adalah bagian dari kalkulus rasional dan metode integral dan sering mengakar di mana seseorang mengambil keputusan.¹⁷ Dalam konteks ini, individu menghadapi "dilema tahanan". Dilema tahanan yang dimaksudkan adalah permainan yang paling banyak digunakan dalam *game theory*. Penggunaannya telah melampaui Ekonomi, yang digunakan di bidang-bidang seperti manajemen bisnis, psikologi, ataupun biologi. Dijuluki pada tahun 1950 oleh Albert W. Tucker, yang mengembangkannya dari karya-karya sebelumnya, ini menggambarkan situasi di mana dua tahanan, yang dicurigai melakukan pencurian, ditahan.

Namun, polisi tidak memiliki cukup bukti untuk menghukum mereka atas kejahatan itu, hanya untuk menghukum mereka atas tuduhan kepemilikan barang curian. Jika tidak ada dari mereka yang mengaku (mereka bekerja sama satu sama lain), mereka berdua akan dikenakan hukuman yang lebih ringan, masing-masing satu tahun penjara. Polisi akan menanyai mereka di ruang interogasi terpisah, yang berarti kedua tahanan tidak dapat berkomunikasi (maka *informasi tidak sempurna*). Polisi akan mencoba meyakinkan setiap tahanan untuk mengakui kejahatan dengan menawarkan mereka "kartu bebas penjara", sementara tahanan lainnya akan dijatuhi hukuman sepuluh tahun. Jika kedua tahanan mengaku (dan karena itu mereka membelot), masing-masing tahanan akan dihukum delapan tahun. Kedua tahanan ditawarkan kesepakatan yang sama dan mengetahui konsekuensi dari setiap tindakan serta sepenuhnya menyadari bahwa tahanan lain telah ditawarkan kesepakatan yang sama persis. Perlu juga dicatat bahwa berbagai faktor situasional dan psikologis dapat berperan dalam mendorong perilaku tidak etis, kadang-kadang terlepas dari niat terbaik individu untuk bertindak secara etis.

D. Hasil & Pembahasan

1. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi

Korupsi merupakan salah satu perbuatan hukum dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan berbagai cara yang

¹⁷ Macrae, J. (1982). Underdevelopment and the economics of corruption: A game theory approach. *World development*, 10(8), 677-687.

dapat merugikan perekonomian negara. Korupsi juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang tidak jujur yang umumnya dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan seperti pejabat, kepala dinas, dan lain-lain. Korupsi dipandang sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa sehingga, diperlukan upaya yang luar biasa juga untuk menghilangkan atau memberantasnya. Korupsi merupakan fenomena besar yang terjadi pada setiap negara. Negara berkembang maupun negara maju juga menghadapi masalah korupsi di negaranya masing-masing. Korupsi juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pendapatan di sebuah negara menjadi sangat rendah dan angka kemiskinan menjadi tinggi. Sebagaimana besar ahli ekonom juga telah menyebutkan bahwa, korupsi ini adalah penghambat utama dari pertumbuhan atau pembangunan ekonomi.¹⁸

Korupsi di Indonesia sudah terjadi pada zaman kerajaan. Bahkan, perusahaan raksasa VOC juga mengalami kebangkrutan karena kegiatan tersebut. Setelah Indonesia sudah menyoarakan proklamasi kemerdekaan maka, penjajah Belanda yang menduduki jabatan-jabatan di Indonesia kembali ke tanah airnya sehingga, kedudukan tersebut kosong. Kekosongan posisi tersebut diisi oleh kaum pribumi yang merupakan pegawai pemerintahan. Mereka tumbuh dan belajar di lingkungan yang penuh dengan kegiatan korupsi. Kultur dari korupsi ini terus berlanjut. Kepala pemerintahan pada orde lama yaitu Soeharto juga telah berupaya untuk memberantas kegiatan ini. Namun ternyata, bukannya memberantas, dia justru menjadi salah satu pelakunya yang pada akhirnya tumbang karena isu korupsi. Hingga saat ini, korupsi sudah menjadi budaya yang sudah sangat melekat pada institusi pemerintahan.¹⁹

¹⁸ Kurniawan, A. (2022, March 23). *Faktor Penyebab Korupsi Internal dan Eksternal, Begini Penjelasan* | merdeka.com. Merdeka.com. Retrieved June 10, 2022, from <https://www.merdeka.com/jabar/faktor-penyebab-korupsi-internal-dan-eksternal-begini-penjelasan-nya-kl.html>

¹⁹ Pangesti, R. (2021, December 14). *Apa yang Dimaksud Korupsi? Ketahui Penyebab dan Upaya untuk Memberantasnya*. Detikcom. Retrieved June 10, 2022, from <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5855061/apa-yang-dimaksud-korupsi-ketahui-penyebab-dan-upaya-untuk-memberantasnya>

Korupsi tidak hanya tentang mengambil atau mencuri uang negara saja tetapi, korupsi juga dapat berupa gratifikasi, suap-menyuap, pencucian uang, penipuan kepada investor, transaksi ganda, dan lain-lain. Dampak dari korupsi ini sangatlah besar karena, korupsi tidak hanya mempengaruhi perekonomian negara saja tetapi, dapat juga memberikan dampak secara tidak langsung kepada kehidupan masyarakat seperti, gagalnya proyek pembangunan lapangan kerja yang dapat menyebabkan kemiskinan masyarakat, pengangguran, dan lain-lain. Tindakan korupsi tidak hanya terjadi pada bidang pemerintahan saja tetapi, dapat terjadi pada bidang bisnis, kesehatan, pengadilan, dan lain-lain. Kegiatan korupsi berupa menyalahgunakan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena kewenangan atau kedudukannya.²⁰

Diskusi tentang korupsi sangat sulit karena merupakan fenomena tersembunyi dalam masyarakat kita. Kedua belah pihak dalam pertukaran kekuasaan untuk hak istimewa ingin merahasiakan transaksi mereka. Hal itu membuat sulit untuk menentukan seberapa luas dan dalam korupsi merambah ekonomi dan kehidupan sosial kita. Terlebih lagi, apa yang bagi sebagian orang pikirkan bahwa hal tersebut tidak lebih dari 'persahabatan' bagi orang lain adalah 'perilaku buruk'. Apa yang di satu tempat bisa menjadi keramahan tidak dapat diterima di tempat lain. Perilaku normal pada saat tertentu dalam sehari mungkin tidak dapat diterima pada waktu lain.

Perbuatan korupsi disebabkan oleh beberapa faktor yang muncul dari internal maupun eksternal. Menurut Sarlito, korupsi dapat disebabkan oleh dua dorongan yaitu dorongan dalam diri sendiri dan dorongan dari luar diri. Dorongan dari luar diri ini mencakup kesempatan, rekan, tidak adanya kontrol, dan lain-lain. Korupsi juga terjadi disebabkan oleh sifat materialistik dan konsumtif pada diri manusia. Sistem politik yang masih mendewakan materi juga menjadi salah satu penyebab dari terjadinya korupsi ini. Masyarakat perlu mengetahui berbagai faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya korupsi

²⁰ *Ibid*

ini agar, masyarakat bisa menghindari atau tidak terjebak pada kegiatan korupsi ini. Faktor-faktor korupsi tersebut antara lain:²¹

1. Sifat yang selalu merasa kurang

Setiap manusia selalu memiliki sifat merasa tidak cukup akan sesuatu. Hasrat besar untuk memiliki segalanya membuat manusia melakukan hal-hal yang melanggar moralitas dalam dirinya. Memiliki hasrat merupakan ciri alamiah setiap makhluk hidup. Namun, jika tidak bisa mengendalikan diri maka dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan keinginannya. Korupsi disebabkan karena keserakahan, rasa rakus, ketidakpuasan akan sesuatu yang sudah didapat, dan selalu merasa kurang. Rasa ingin yang lebih inilah membuat orang-orang yang memiliki kewenangan atau kedudukan itu melakukan tindakan tidak bermoral tersebut. Umumnya, para petinggi atau orang yang memiliki kedudukan itu sudah pasti memiliki kekayaan yang cukup besar. Namun, sifat yang merasa tidak cukup dan rakus itulah yang membuat mereka ingin lebih memperkaya diri sendiri dengan cara yang salah seperti korupsi.

2. Moral yang Lemah

Seseorang yang tidak kuat akan prinsip moralnya cenderung untuk melakukan hal-hal yang tidak baik seperti korupsi. Dorongan atau godaan korupsi dapat datang darimana saja seperti teman, rekan kerja, keluarga, pihak lain, dan lain-lain. Untuk dapat melawan godaan korupsi, moralitas harus diperkuat dengan berbagai cara seperti bergabung ke organisasi penyuluh antikorupsi, dan lain-lain. Moralitas yang lemah dapat mencelakakan diri sendiri dan orang lain.

3. Penghasilan kurang atau tidak sesuai

Penghasilan seorang pekerja seharusnya sesuai dengan kebutuhan hidup yang wajar dan berat pekerjaannya. Jika penghasilan tidak sesuai maka, akan terjadi korupsi karena, pekerja tersebut ingin mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan berbagai cara. Bupati Banjarnegara,

²¹ Wulandari, T. (2022, March 9). *16 Faktor Penyebab Korupsi dari Aspek Individu hingga Organisasi*. Detikcom. Retrieved June 12, 2022, from <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5975109/16-faktor-penyebab-korupsi-dari-aspek-individu-hingga-organisasi>

Budhi Sarwono pernah mengatakan bahwa, gaji yang didapatnya sebagai bupati jauh dari ideal. Dia mengatakan bahwa, gaji yang sedikit ini akan memicu korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah dan penyimpangan lainnya. Nominal gaji Bupati ini dianggap terlalu rendah dibandingkan anggota DPRD. Bupati ini menyampaikan keluhan tentang gajinya agar presiden dapat mendengarnya. Tidak lama kemudian, dikarenakan dia merasa gajinya sebagai bupati masih rendah, bupati tersebut melakukan tindakan korupsi, agar mendapat nominal pendapatan yang menurutnya sesuai dengan berat pekerjaannya.

4. Dorongan Keluarga

Terkadang, dorongan keluarga juga dapat membuat seseorang melakukan tindakan korupsi. Kaum behavioris pernah menyatakan bahwa, dorongan keluarga bisa mendorong seseorang melakukan korupsi. Hal ini disebabkan karena, lingkungan terkedatnya yaitu keluarga yang seharusnya mengarahkan dan membangun moralitas yang baik dalam dirinya, justru malah mendukung dirinya untuk melakukan tindakan korupsi. Bahkan, terkadang keluarganya juga dapat menekan atau memaksa orang tersebut tersebut untuk melakukan tindak kotor itu.²²

5. Gaya Hidup Konsumtif

Gaya hidup yang konsumtif merupakan salah satu faktor internal dan eksternal terjadinya korupsi. Terkadang, hidup di kota-kota besar, mendorong seseorang untuk memiliki gaya hidup yang konsumtif, agar bisa diterima dalam lingkungan sosialnya. Terkadang, gaya hidup yang konsumtif ini tidak bisa disesuaikan dengan pendapatan atau penghasilan yang mereka miliki sehingga, mereka terdorong untuk melakukan korupsi agar dapat menyesuainya. Perilaku konsumtif dapat dicontohkan seperti membeli barang-barang mahal ataupun ekonomis yang tidak terlalu dibutuhkan, menghambur-hamburkan uang untuk kesenangan sementara seperti judi, dan sejenisnya. Perilaku konsumtif ini

²² Pangesti, R. (2021, December 14). *Apa yang Dimaksud Korupsi? Ketahui Penyebab dan Upaya untuk Memberantasnya*. Detikcom. Retrieved June 12, 2022, from <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5855061/apa-yang-dimaksud-korupsi-ketahui-penyebab-dan-upaya-untuk-memberantasnya>

dilakukan agar mereka bisa diterima dan dapat memenuhi keinginannya yang sementara.

6. Sikap masyarakat terhadap bahaya korupsi

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya korupsi bisa menjadi salah satu faktor terjadinya korupsi. Terkadang, masyarakat tidak menyadari bahwa, korupsi sangat merugikan dirinya. Mereka juga tidak menyadari bahwa, mereka terlibat dalam praktik kegiatan korupsi. Terbiasa atau tidak peduli dengan kegiatan korupsi yang terjadi di daerahnya, membuat masyarakat menjadi tidak kritis pada aktivitas korupsi. Masyarakat juga memandang bahwa, jika korupsi terjadi maka, yang rugi hanyalah negara. Padahal, jika negara mengalami kerugian ekonomi akibat korupsi maka, anggaran yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat tidak dapat berjalan dengan baik karena, dipangkas oleh pelaku korupsi. Masyarakat juga memandang bahwa, pencegahan dan pemberantasan tindakan korupsi merupakan tugas pemerintah saja. Padahal, semua masyarakat juga ikut bertanggung jawab dalam mencegah dan memberantas praktik-praktik korupsi yang terjadi di sekitar lingkungannya.²³

Dalam hal lain juga terdapat beberapa sebab terjadinya korupsi sehingga ada beberapa ahli yang mengklasifikasi penyebab terjadinya korupsi. Salah satunya adalah Boni Hargen yang menjadi penyebab korupsi dalam tiga bagian atau wilayah, yaitu

- a. Wilayah Individu, dikenal dengan aspek manusia yang terkait mengenai moralitas suatu personal serta berdasarkan kondisi situasional seperti peluang terjadinya korupsi termasuk di kedalam hal tersebut.
- b. Wilayah Sistem, hal ini bisasa dikenal dengan sebutan aspek mengenai institusdi atau administrasi. Korupsi yang dianggap

²³ Christvidya, K. P. (2022, February 25). *7 Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Terjadinya Korupsi di Indonesia*. Fimela.com. Retrieved June 12, 2022, from <https://www.fimela.com/lifestyle/read/4895746/7-faktor-internal-dan-eksternal-penyebab-terjadinya-korupsi-di-indonesia>

sebagai suatu konsekuensi dari kerja sistem yang tidak efektif. Mekanisme controls yang cenderung lemah dan rapuh di dalam sebuah sistem memberi peluang terhadap terjadinya suatu tindakan korupsi.

- c. Wilayah Irisan antara Individu dan sistem, dikenal dengan aspek sosial budaya, yang meliputi mengenai hubungan politisi, unsur pemerintahan dan organisasi non pemerintah. Selain hal tersebut meliputi juga mengenai kultur masyarakat yang cenderung permisif dan kurang peduli mengenai hal-hal yang tidak terpuji. Di lain hal, mengenai terjadinya pergeseran nilai, logika, sosial dan ekonomi yang ada dalam masyarakat.²⁴

Dengan berbagai faktor dan sebab adanya korupsi, di sisi lain juga korupsi menimbulkan dampak negative atau kerugian yang signifikan terhadap bangsa Indonesia dari dahulu hingga saat ini yang sangat kompleks kasusnya. Menurut Soejono Karni, korupsi memiliki dampak, yaitu

- a) rusaknya sistem tatanan masyarakat,
- b) ekonomi biaya tinggi dan sulit melakukan efisiensi,
- c) munculnya berbagai masalah sosial di masyarakat,
- d) penderitaan sebagian besar masyarakat di sektor ekonomi, administrasi,
- e) politik, maupun hukum,
- f) yang pada akhirnya menimbulkan sikap frustrasi, ketidakpercayaan, apatis
- g) terhadap pemerintah yang berdampak kontraproduktif terhadap
- h) pembangunan.

2. Mahasiswa dan Kreativitas Gerakan Anti-Korupsi

Mahasiswa adalah satu elemen yang unik dalam masyarakat. Jumlah tidak banyak tetapi, sejarah sudah menunjukkan bahwa, dinamika bangsa ini tidak

²⁴ Mohamad Risbiyantoro.2005. PERANAN MAHASISWA DALAM MEMERANGI KORUPSI. BPKP.

lepas dari peran mahasiswa. Apabila kita lihat ke dalam sejarah maka, kita akan melihat bahwa, setiap perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari peran mahasiswa. Munculnya semangat mahasiswa itu didasarkan oleh keinginan untuk melakukan berbagai perubahan atas keadaan yang sudah dianggap tidak adil. Mahasiswa tahu kapan dia harus melakukan sesuatu untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Perjuangan mahasiswa dalam memperjuangkan idealisme belum bisa berakhir, meskipun penjajahan yang membuat bangsa menjadi terpuruk sudah tidak ada karena, pada sekarang ini, lahir sebuah masalah baru yang bisa membuat masyarakat dan bangsa Indonesia menjadi terpuruk. Masalah tersebut yaitu korupsi yang menjangkit seperti virus di setiap wilayah Indonesia. Oleh karena itu, mahasiswa harus diberikan semangat dan pembekalan akan pengetahuan antikorupsi agar, mereka memiliki pandangan kuat bahwa, korupsi adalah musuh utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa sehingga, harus diperangi semaksimal mungkin.²⁵

Korupsi sifatnya sangatlah luar biasa, maka dari itu, dibutuhkan juga upaya luar biasa dalam melawan atau memberantasnya. Upaya untuk melawan korupsi bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Upaya untuk memberantas korupsi tidak bisa hanya melibatkan pemerintah. Oleh karena itu dibutuhkan bantuan dari masyarakat. Mahasiswa adalah komponen penting dalam masyarakat sehingga, mereka diharapkan untuk dapat berperan aktif dalam upaya pemberantasannya. Peran penting mahasiswa tersebut tidak bisa dilepaskan dari karakteristik yang dimilikinya yaitu; intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme yang tinggi. Bukti dari karakteristik tersebut dapat dilihat dari sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam peristiwa-peristiwa besar mahasiswa memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai agen perubahan.²⁶

²⁵ Risbiyantoro, M. (2005). *PERANAN MAHASISWA DALAM MEMERANGI KORUPSI*. Modul Sosialisasi Anti Korupsi BPKP. Retrieved June 11, 2022, from https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/Gambar/PDF/peranan_mahasiswa.pdf

²⁶ Hermawan, L. A. (2021, December 7). *Keterlibatan Mahasiswa dalam Pendidikan Anti Korupsi di Masyarakat*. Kompasiana.com. Retrieved June 12, 2022, from <https://www.kompasiana.com/lutfiadi/61af321575ead648f352df42/keterlibatan-mahasiswa-dalam-pendidikan-anti-korupsi-di-masyarakat>

Dalam melawan korupsi ini, mahasiswa harus mengenal diri mereka sendiri terlebih dahulu seperti mengetahui kekuatan dan kemampuan apa yang dimilikinya yang dapat dia gunakan untuk melawan praktik korupsi. Mahasiswa harus melakukan pembenahan terhadap dirinya sendiri dan kampusnya agar dapat berperan secara optimal dalam melawan serta memberantas kegiatan korupsi. Selain itu, mahasiswa perlu memberikan dirinya sendiri penekanan moralitas dengan cara berkompetisi untuk memperoleh nilai yang sebaik-baiknya tanpa melakukan berbagai cara yang tidak benar.

Mahasiswa juga harus memulai untuk menanamkan kesadaran pada diri masing-masing untuk tidak boleh melakukan tindakan-tindakan korupsi meskipun sifatnya sederhana seperti berbuat curang saat ujian, memberikan uang suap kepada pengajar atau pengurus kampus, menitipkan absen jika tidak masuk ke dalam kelas, dan lain-lain. Mahasiswa juga bisa menumbuhkan komitmen antikorupsi ini dengan cara membuat sebuah komunitas yang berprinsip pada pemberantasan praktik korupsi atau menjadi penyuluh antikorupsi. Mahasiswa harus benar-benar memahami prinsip-prinsip atau nilai-nilai dari antikorupsi dengan cara mengikuti seminar, kuliah antikorupsi, dan lain-lain sehingga, mereka dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat awam tentang bahaya korupsi dan menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan pemerintah yang perlu dikontrol agar, kesejahteraan masyarakat dapat dijamin serta, tidak ada unsur-unsur korupsi dalam kebijakan tersebut.²⁷

Kampus merupakan tempat di mana orang-orang berpendidikan berkumpul sedang menimba ilmu untuk membuat diri menjadi lebih baik. Secara tidak sadar, korupsi juga ada di sekitar kita. Kita selama ini hanya membayangkan orang yang melakukan korupsi hanyalah dia yang melanggar UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001. Namun, pada faktanya korupsi yang sebesar itu diawali dengan hal-hal yang kecil seperti titip absen di kelas,

²⁷ Irawan, I. (2021, June 9). *Aksi Nyata Mahasiswa Untuk Mencegah Perbuatan Korupsi*. BINUS UNIVERSITY. Retrieved June 12, 2022, from <https://binus.ac.id/character-building/2021/06/aksi-nyata-mahasiswa-untuk-mencegah-perbuatan-korupsi/>

berbuat curang pada saat ujian, dan lain-lain. Membiasakan hal-hal yang tidak benar tersebut merupakan awal atau bibit dari tindak pidana korupsi. Korupsi diawali dari hal-hal yang tidak benar tetapi, kita anggap benar karena terbiasa. Pada tahun 2016, ada salah satu isu di kampus ternama. Dalam pemilihan rektornya, pemilihan pejabat kampus, dan lain-lain ada tindakan atau unsur korupsi di dalamnya. Oleh karena itu, kampus tidak kebal dari korupsi meskipun kampus merupakan lembaga pendidikan. Di dalam kampus juga berpotensi terjadi praktik korupsi.

Kita juga harus menggelorakan semangat antikorupsi di kampus karena, mahasiswa adalah SDM pemimpin masa depan. Di masa depan, mahasiswa sekarang ini pasti akan memiliki profesinya masing-masing. Dalam berbagai profesi tersebut kemungkinan besar akan bersinggungan dengan praktik korupsi di dalamnya. Jika dari sekarang mahasiswa sudah memiliki komitmen untuk melawan praktik korupsi maka kedepannya, mahasiswa dapat menjadi pemimpin atau pekerja yang berkomitmen untuk tetap bersih. Oleh karena itu, mahasiswa harus dipupuk komitmen antikorupsi di kampus. Mahasiswa juga dikatakan sebagai agen-agen perubahan bangsa. Mahasiswa memiliki kemurnian dan idealisme tinggi untuk menjunjung kejujuran. Oleh karena itu, hal tersebut harus dipupuk lebih lanjut dalam kampus.²⁸

Untuk mahasiswa yang tengah semangat-semangatnya mengenai suatu idealis salah satunya anti korupsi, mahasiswa dapat ikut serta berperan dalam pemberantasan korupsi agar dapat secara optimal dalam memberantas korupsi di wilayah kampus, dimana sejatinya kampus tempat orang berpendidikan dan dapat menerapkan sikap yang baik dalam kehidupannya. Untuk mewujudkan kampus yang bersih korupsi atau mencegah korupsi, salah satunya dengan memberikan pembenahan terhadap diri serta kampus kita, dengan kata lain mahasiswa dapat mengimplentasikan atau mendemonstrasikan sikap anti korupsi di dunia kampus. Upaya pemberantasan korupsi dapat dimulai dari awal perkuliahan. Dalam hal ini dapat berupa kritik terhadap *stake holder* di

²⁸ Christvidya, K. P. (2022, February 25). 7 Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Terjadinya Korupsi di Indonesia. Fimela.com. Retrieved June 12, 2022, from <https://www.fimela.com/lifestyle/read/4895746/7-faktor-internal-dan-eksternal-penyebab-terjadinya-korupsi-di-indonesia>

kampus, hal tersebut bertujuan agar tidak memberikan ruang sekecil mungkin untuk melakukan tindak korupsi. Di sisi lain mahasiswa dapat lebih berani atau lebih percaya diri dalam melakukan pelaporan mengenai akan tindakan korupsi.

Mahasiswa sebagai memiliki kekuatan dalam melakukan suatu perubahan, halini kenapa mahasiswa menjadi garda terdepan dalam melakukan perubahan, dalam menyuarakan dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran serta keberanian dalam menentang segala bentuk ketidakadilan, mahasiswa menempati posisi yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kekuatan tersebut bagaikan pisau yang bermata dua, di satu sisi, mahasiswa mampu mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk bertindak atas ketidakadilan sistem termasuk didalamnya tindakan penyelewengan jabatan dan korupsi. Sedangkan di sisi yang lain, mahasiswa merupakan faktor penekan bagi penegakan hukum bagi pelaku korupsi serta pengawal bagi terciptanya kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak.²⁹

Dalam memberikan mahasiswa pengertian tersebut, dapat juga dipersamakan dengan penanaman nilai-nilai atau doktrin mengenai anti korupsi terhadap mahasiswa, terkhususnya mahasiswa baru. Dalam penanaman nilai anti korupsi dipengaruhi oleh cara penyampaian dan pendekatan pembelajaran yang dipergunakan. Untuk tidak menambah beban mahasiswa yang sudah cukup berat mengenai perkuliahan, perlu diperhatikan dalam melakukan pendekatan yang akan dilakukan. Dalam perihal tersebut, terdapat tiga model penyelenggaraan pembelajaran guna menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang bisa diimplementasikan, yakni sebagai berikut:

- 1) Model Terintegrasi dalam Mata kuliah, penanaman nilai anti korupsi dalam pembelajaran anti korupsi bisa diinformasikan secara terintegrasi dalam seluruh mata kuliah. Dosen bisa memilah nilai-nilai yang hendak ditanamkan lewat bahasan perkuliahan. Dengan perihal tersebut nilai-

²⁹ Mohamad Risbiyantoro.2005. PERANAN MAHASISWA DALAM MEMERANGI KORUPSI. BPKP.

- nilai anti korupsi bisa ditanamkan lewat sebagian inti atau sub inti bahasan yang berkaitan dengan tata nilai kehidupan.
- 2) Model di Luar Pembelajaran Lewat Aktivitas Ekstrakurikuler, Nilai-nilai antikorupsi bisa diajarkan lewat aktivitas non pendidikan layaknya aktivitas tambahan (ekstrakurikuler) serta di luar pekerjaan. Pembinaan nilai dengan model ini mengutamakan pengolahan serta pencetakan nilai melalui kegiatan berdiskusi serta menggali nilai-nilai kehidupan. Keunggulan model ini ialah siswa betul-betul menaikkan nilai via pengalaman nyata. Pengalaman tertanam lebih dalam dari data murni, belum lagi informasi monolog. Siswa lebih ikut serta dalam menggali nilai-nilai kehidupan serta pendidikan lebih menarik. Kelemahan model ini terletak pada realitas kalau dalam konteks pembelajaran tatap muka tidak terdapat struktur yang senantiasa paten dan memerlukan waktu yang lebih lama. Model ini tidak cuma memerlukan peristiwa universal, namun pula terkait uraian atau penjabaran yang mendalam tentang kreativitas serta kebutuhan siswa. Kamu memerlukan partner yang tidak labil dan mempunyai anggapan atau perspektif yang sama. Tipe aktivitas ini tidak dapat cuma diimplementasikan sekali atau 2 kali dalam setahun serta wajib diulang.
 - 3) Model Pembudayaan, Pembiasaan Nilai dalam segala kegiatan serta atmosfer Kampus, Penanaman nilai-nilai antikorupsi dapat jua ditanamkan lewat pembudayaan pada seluruh kegiatan kampus. Pembudayaan hendak menyebabkan sesuatu pembiasaan. Guna meningkatkan budaya antikorupsi butuh perencanaan terhadap suatu budaya & kegiatan rutinitas. Untuk mahasiswa, sebuah rutinitas amatlah berarti. Lantaran memakai rutinitas seperti itu kesimpulannya sesuatu aktivitas hendak selaku kepunyaan mahasiswa pada kemudian hari. Pembiasaan yg baik dapat memprakarsai sosok insan yang berkepribadian yg baik pula. Kebalikannya, pembiasaan yg berlainan dengan kata baik dapat menciptakan sosok insan yg berkepribadian yg tidak baik juga. Bersumber pada rutinitas seperti itu, mahasiswa terbiasa dari & taat pada peraturan-peraturan yg berlaku pada lingkup kampus &

warga, selesainya menerima pembelajaran pembiasaan yg baik pada kampus pengaruhnya jua terbawa pada kehidupan sehari-hari pada tempat tinggal & hingga dewasa nanti. Menanamkan norma yg baik memang nir gampang & jua membutuhkan ketika yg lama, namun sesuatu yg telah sebagai norma sukar juga buat mengubahnya. Dalam rangka mendukung praktek anti korupsi tadi penanaman nilai-nilai anti korupsi bisa jua ditanamkan melalui pembudayaan pada semua kegiatan dan suasana kampus.³⁰

Usaha dan upaya terkait memberantas korupsi adalah sesuatu yang tidak mudah. Beberapa pengalaman dari negara lain menunjukkan bahwa korupsi dapat sukses diberantas apabila hadirnya masyarakat dan seluruh anggota/elemen negara turut disertakan dalam hal kegiatan pemberantasan ini yang diimplementasikan dengan berbagai upaya simultan. Adapun dalam hal mendorong kegiatan pemberantasan/penumpasan korupsi dilaksanakan berdasarkan beberapa aspek seperti dibawah ini, yakni:

- a) Paham akan segala hal sebab yang berkaitan dengan faktor terjadinya korupsi,
- b) Melakukan usaha preventif, pemeriksaan, dan bimbingan yang dilaksanakan dengan seiring,
- c) Upaya perilaku disorotkan kepada sebuah aktivitas dari awal hingga akhir (terhitung dari persiapan, konkretisasi kegiatan, penilikan dan unsur pemulihnya) dan mencakup berbagai materi³¹.

E. Kesimpulan

Korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi negara maupun masyarakat di negara tersebut sehingga menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Di indonesia sendiri tindak

³⁰ Burhanuddin, Achmad Asfi.2021. Strategi Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Mahasiswa. Jurnal Studi Ilmu Agama Islam. Vol. 2 No. 2 Hal 69-70

³¹ Mohamad Risbiyantoro.2005. PERANAN MAHASISWA DALAM MEMERANGI KORUPSI. BPKP.

pidana korupsi sudah terjadi dari jaman dahulu, tindakan pidana korupsi sendiri tidak hanya di bidang pemerintahan saja namun juga dapat terjadi di bidang umum lainnya. Tindakan korupsi sendiri dapat terjadi karena ada faktor pendorongnya baik dari luar maupun dari dalam seperti Sifat yang selalu merasa kurang, Moral yang Lemah, Penghasilan kurang atau tidak sesuai, gaya Hidup Konsumtif, Sikap masyarakat terhadap bahaya korupsi Sehingga mahasiswa memiliki peran yang penting dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran atas ketidakadilan yang ada di negara ini, mahasiswa memiliki kekuatan dan semangat dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan, sehingga berperan penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia, mahasiswa dapat mendorong dan menggerakkan masyarakat agar bertindak untuk menciptakan keadilan agar tidak terjadi tindakan korupsi, mahasiswa juga menjadi pengawal dalam terciptanya kebijakan publik yang memihak kepentingan masyarakat.

F. Acknowledgment

We would like to thank all parties involved in this research and this community services program.

G. Declaration of Conflicting Interests

The authors declare that there is no conflict of interest in this research or the publication of this research.

H. Funding Information

This research was funded by Universitas Negeri Semarang through scheme Community Services Program 2022 DIPA UNNES of 2022.

I. References

Achmad Fatchan dan Wayan Dasna, *Metodologi Penelitian Tindakan Kelas* (Surabaya: Jengala Pustaka Utama, 2009), 13.

- Appolloni, A., & Nshombo, J.M. (2014). Public Procurement and Corruption in Africa: A Literature Review.
- Arif Hidayat and Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio Equilibrium Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 133, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>
- Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 55.
- Burhanuddin, Achmad Asfi. 2021. Strategi Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Mahasiswa. *Jurnal Studi Ilmu Agama Islam*. Vol. 2 No. 2 Hal 69-70
- Christvidya, K. P. (2022, February 25). *7 Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Terjadinya Korupsi di Indonesia*. Fimela.com. Retrieved June 12, 2022, from <https://www.fimela.com/lifestyle/read/4895746/7-faktor-internal-dan-eksternal-penyebab-terjadinya-korupsi-di-indonesia>
- Christvidya, K. P. (2022, February 25). *7 Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Terjadinya Korupsi di Indonesia*. Fimela.com. Retrieved June 12, 2022, from <https://www.fimela.com/lifestyle/read/4895746/7-faktor-internal-dan-eksternal-penyebab-terjadinya-korupsi-di-indonesia>
- Debski, J., Jetter, M., Möhle, S., & Stadelmann, D. (2018). Gender and corruption: The neglected role of culture. *European Journal of Political Economy*, 55, 526-537.
- Groenendijk, N.S. (1997). A principal-agent model of corruption. *Crime, Law and Social Change*, 27, 207-229.
- Groenendijk, N.S. (1997). A principal-agent model of corruption. *Crime, Law and Social Change*, 27, 207-229.
- Hermawan, L. A. (2021, December 7). *Keterlibatan Mahasiswa dalam Pendidikan Anti Korupsi di Masyarakat*. Kompasiana.com. Retrieved June 12, 2022, from <https://www.kompasiana.com/lutfiadi/61af321575ead648f352df42/keterlibatan-mahasiswa-dalam-pendidikan-anti-korupsi-di-masyarakat>
- Huda, M. W. S., & Hidayat, A. (2021). Quo Vadis Pendidikan di Masa Pandemi: Menyoal Tanggung Jawab Negara terhadap Hak atas Pendidikan Peserta Didik. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1)
- Irawan, I. (2021, June 9). *Aksi Nyata Mahasiswa Untuk Mencegah Perbuatan Korupsi*. BINUS UNIVERSITY. Retrieved June 12, 2022, from <https://binus.ac.id/character-building/2021/06/aksi-nyata-mahasiswa-untuk-mencegah-perbuatan-korupsi/>
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling Corruption*. University of California Press. https://www.google.co.id/books/edition/_/ak8xdW1sY4sC?hl=id&gbpv=1

- ; Shleifer, Andrei, and Robert W Vishny. 1993. "Corruption." *Quarterly Journal of Economics* 108 (3): 599-617
- Klitgaard, R., & Treverton, G. F. (2004). Assessing partnerships: New forms of collaboration. *Collaboration: Using networks and partnerships*, 21-60; Persson, A., Rothstein, B., & Teorell, J. (2013). Why Anticorruption Reforms Fail—Systemic Corruption as a Collective Action Problem. *Governance*, 26, 449-471.
- Kurniawan, A. (2022, March 23). *Faktor Penyebab Korupsi Internal dan Eksternal, Begini Penjelasmnya* | *merdeka.com*. Merdeka.com. Retrieved June 10, 2022, from <https://www.merdeka.com/jabar/faktor-penyebab-korupsi-internal-dan-eksternal-begini-penjelasmnya-klm.html>
- Lasmauli Noverita Simarmata, 2021. *Korupsi Sekarang dan yang Akan Datang*, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11 (2), hlm. 88.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013) 11.
- Luo, Y. (2005). An organizational perspective of corruption1. *Management and Organization Review*, 1(1), 119-154.
- Macrae, J. (1982). Underdevelopment and the economics of corruption: A game theory approach. *World development*, 10(8), 677-687.
- Marquette, H., & Peiffer, C. (2015). Corruption and collective action
- Mohamad Risbiyantoro.2005. PERANAN MAHASISWA DALAM MEMERANGI KORUPSI. BPKP.
- Pangesti, R. (2021, December 14). *Apa yang Dimaksud Korupsi? Ketahui Penyebab dan Upaya untuk Memberantasnya*. Detikcom. Retrieved June 10, 2022, from <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5855061/apa-yang-dimaksud-korupsi-ketahui-penyebab-dan-upaya-untuk-memberantasnya>
- Pangesti, R. (2021, December 14). *Apa yang Dimaksud Korupsi? Ketahui Penyebab dan Upaya untuk Memberantasnya*. Detikcom. Retrieved June 12, 2022, from <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5855061/apa-yang-dimaksud-korupsi-ketahui-penyebab-dan-upaya-untuk-memberantasnya>
- Persson, A., Rothstein, B., & Teorell, J. (2013). Why Anticorruption Reforms Fail—Systemic Corruption as a Collective Action Problem. *Governance*, 26, 449-471.
- Risbiyantoro, M. (2005). *PERANAN MAHASISWA DALAM MEMERANGI KORUPSI*. Modul Sosialisasi Anti Korupsi BPKP. Retrieved June 11, 2022, from

https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/Gambar/PDF/peranan_mahasiswa.pdf

Scott, W. R. (2005). Institutional theory: Contributing to a theoretical research program. *Great minds in management: The process of theory development*, 37(2), 460-484.

Wulandari, T. (2022, March 9). *16 Faktor Penyebab Korupsi dari Aspek Individu hingga Organisasi*. Detikcom. Retrieved June 12, 2022, from <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5975109/16-faktor-penyebab-korupsi-dari-aspek-individu-hingga-organisasi>